

# Keputusan Filipina Membuka Kembali Pangkalan Militer Amerika Serikat Melalui Perjanjian Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) Tahun 2014

Nur Ardi Setiawan, Bagus Sigit Sunarko, Abubakar Eby Hara

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember,  
Jember 68121, Indonesia

e-mail: bgs\_sigit@yahoo.com

## Abstract

*The Philippines and the United States have been in a long relationship. The Philippines for the United States is an important ally in maintaining the stability of the Asia Pacific region. Post-independence granted by the United States to the Philippines in 1946, the two countries have carried out various military cooperation. One of them is the rental cooperation used by the United States military as their military base in the Asia Pacific region. These plans are Subic and Clark. In 1991 the land lease agreement used by the United States as their military base had to be stopped by the Philippine Government.. In 2014, the Philippines accepted an agreement to strengthen military defense with the United States. The agreement was named Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). The agreement discussed bringing back the presence of US troops in the Philippines by giving access to a number of military bases in the Philippines, one of which belongs to the United States. This study uses a qualitative descriptive method using secondary data. The process of collecting data is needed using library research techniques. The data used in this study is information about the 2014 EDCA agreement and cooperation between the Philippines and the United States in the field of military and regional security. The reason the Philippines reopened the US military base is to confront China in a border dispute in the South China Sea where the Philippines is unable to deal directly with China which has greater military power. Then the second reason is dealing with action terror in the southern Philippines region as a result of the rising wave of terrorism in the Asia Pacific.*

**Keywords:** Security, military base, foreign policy

## 1. Pendahuluan

Amerika Serikat sebagai negara sekutu dari Filipina, dijadikan sebagai mitra dalam membangun kekuatan militer mereka. Hubungan kedua negara tersebut sudah lama terjalin. Dahulu Filipina merupakan negara bekas jajahan Amerika Serikat sejak tahun 1989. Kemudian diberi kemerdekaan pada tahun 1946 oleh Amerika Serikat setelah direbut kembali dari Jepang. Pada tahun 1947, Filipina menandatangani perjanjian *Military Assistance Agreement* dengan Amerika Serikat sebagai timbal balik setelah diberi kemerdekaan oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan sewa lahan antara Filipina dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut Filipina harus menyewakan lahannya untuk digunakan sebagai pangkalan militer milik AS (Kaliwarang 2009). Daerah tersebut ialah Teluk Subic dan Clark. Kemudian sebagai imbalannya Amerika Serikat memberikan latihan militer terhadap tentara Filipina.

Pada tahun 1951, Filipina dan AS kembali menjalin kerjasama militer. Perjanjian tersebut dikenal dengan MDT (Mutual Defense Treaty). MDT merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya yaitu *Military Assistance Agreement* pada tahun 1947. Dalam perjanjian ini membahas program dari Filipina dan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan teritori di wilayah Asia Pasifik selama Perang Dingin (GOVPH 2013). Bagi Amerika Serikat, wilayah Filipina menjadi penting untuk dilindungi karena menjadi tembok terdepan bagi Amerika Serikat di sebelah Utara Asia Tenggara pada waktu itu. Hal ini juga disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Arthur Radford,

yang menilai pangkalan militer di Filipina sangat penting bagi kepentingan pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat Daya (Kaliwarang 2009). Pada tahun 1991, kerjasama militer antara Filipina dan Amerika Serikat berakhir dikarenakan keputusan senat Filipina yang tidak meratifikasi perjanjian pangkalan militer baru. Senat Filipina menutup dua pangkalan militer milik Amerika Serikat di Teluk Subic dan Clark (Mukhti 2014). Tahun 1992, militer Amerika Serikat resmi meninggalkan pangkalan udara Clark dan dermaga laut Subic setelah hampir satu abad berada di Filipina. Meskipun telah meninggalkan Filipina, militer Amerika Serikat tetap melakukan hubungan kerjasama militer dengan Filipina. Diantaranya perjanjian Pasukan Kunjungan pada tahun 1998 dan Perjanjian Dukungan Logistik Timbal Balik pada tahun 2002

Pada tahun 2011, Filipina membuka kembali kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Pada bulan November 2011, Sekretaris negara Amerika Serikat Hillary Clinton mengunjungi Filipina guna membahas kerjasama pertahanan (MDT) kembali yang pernah dilakukan oleh kedua belah pihak pada tahun 1951 (Whaley 2011). Pertemuan tersebut melahirkan Deklarasi Manila yang mana ditandatangani oleh Hillary Clinton dan Albert del Rosario di Manila. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa (GOVPH 2012): “*The Republic of the Philippines and the United State today reaffirm our Shared Obligation under the Mutual Defense Treaty*”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Filipina dan Amerika Serikat serius dalam menjalin hubungan mereka kembali seperti dalam perjanjian *Mutual Defense Treaty* (MDT) pada tahun 1951. Isi dari Deklarasi Manila salah satunya adalah menekankan pada kerjasama antara Filipina dan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan regional. Kemudian Deklarasi tersebut ditegaskan dengan pernyataan dari Hillary Clinton pada Mei 2012, yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah setuju untuk menandatangani kembali kerjasama militer dengan Filipina (Whaley 2011).

Pada pertemuan kedua ini membahas mengenai komitmen diantara kedua negara yang terkait dengan peningkatan kerjasama diantara keduanya. Pada tahun 2014, Filipina dan Amerika Serikat kembali menegaskan hubungan mereka dalam kerjasama militer dengan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* pada 28 April 2014 (Tempo 2014). Perjanjian ini terbentuk menyusul kunjungan Presiden Barack Obama ke negara – negara Asia pada bulan Maret. *Enhanced Defense Cooperation Agreement* atau EDCA ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin dan Duta Besar AS untuk Filipina Philip Goldberg yang mana perjanjian tersebut berlaku sampai sepuluh tahun kedepan (Tempo 2014).

Dalam kerjasama tersebut, Filipina mengizinkan militer Amerika Serikat untuk mengakses sejumlah pangkalan militer, pelabuhan, dan lapangan udara. Kemudian militer Amerika Serikat juga akan dirotasi dalam mengakses fasilitas tersebut dan melakukan latihan bersama dengan militer Filipina. Fasilitas yang mungkin dapat diakses oleh militer Amerika Serikat adalah pangkalan militer di Manila, Clark, Palawan, Cebu, Nueva Ecij, dan La Union (Jakarta greater 2014). Perjanjian EDCA yang disepakati oleh Filipina dan Amerika Serikat pada tahun 2014, membuat Filipina kembali membuka pangkalan militer Amerika Serikat yang sempat ditutup pada tahun 1992. Perjanjian EDCA juga membuat kehadiran militer Amerika Serikat kembali meningkat dikawasan Asia Pasifik pasca perang dingin dengan Uni Soviet

## 2. Metodologi

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teori pengambilan kebijakan politik luar negeri milik William D. Coplin untuk menemukan alasan dari Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui Perjanjian EDCA tahun 2014. Menurut William D. Coplin dalam teori pengambilan keputusan, politik luar negeri dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Tiga pertimbangan tersebut diantaranya adalah:

#### 1. *Kondisi politik dalam negeri/politik domestik*

Dalam pandangan Coplin, politik dalam negeri suatu negara memiliki peranan penting kaitannya dengan proses pengambilan keputusan politik luar negeri dari negara tersebut. Coplin menjelaskan lebih lanjut terkait politik dalam negeri dengan fokus penjelasan tentang adanya peran aktor – aktor politik dalam penyusunan suatu keputusan politik luar negeri suatu negara. Aktor – aktor tersebut dikenal dengan *policy influencer* (aktor yang mempengaruhi kebijakan). Dalam hal ini *policy influencer* bertindak sebagai faktor pendorong penyusunan suatu politik luar negeri. Aktor tersebut ialah : birokrasi, partai, kelompok kepentingan dan massa.

#### 2. *Kondisi ekonomi atau militer*

Dalam proses penyusunan politik luar negeri, Coplin berasumsi bahwa pertimbangan pada aspek kondisi ekonomi dan militer negara menjadi salah satu faktor pendorong para aktor pembuat keputusan politik luar negeri merumuskan suatu formulasi politik luar negerinya di dunia internasional. Pengambil keputusan luar negeri juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi atau militer, serta memperhatikan kelemahan negara dalam penyusunan politik luar negeri. Para pembuat keputusan luar negeri harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan – keterbatasannya, yang mana diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer.

#### 3. *Konteks Internasional*

Menurut Coplin, kondisi internasional atau konteks internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri suatu negara. Terdapat tiga elemen utama dalam konteks internasional yang mempengaruhi penyusunan politik luar negeri. Pertama, kondisi geografis, ekonomi dan politik internasional (Coplin 1992).

Dalam pembuatan keputusan politik luar negeri selalu melalui mekanisme politik dimana tuntutan dari domestik politik atau politik dalam negeri, kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer negara, serta pertimbangan kondisi internasional, menjadi tiga determinan yang mempengaruhi hasil dari mekanisme politik tersebut. Untuk lebih jelas memahami tentang proses pembuatan keputusan politik luar negeri seperti yang dijelaskan William D. Coplin, berikut akan ditampilkan model pengambilan keputusan luar negeri.

### 3. Hasil dan Diskusi

Penulis dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Filipina dalam membuka kembali dan memberikan akses ke sejumlah pangkalan militer kepada Pasukan Amerika Serikat melalui Perjanjian EDCA dipengaruhi oleh beberapa situasi internasional. Kondisi atau kondisi internasional tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi dan militer negara Filipina. Terdapat dua situasi Internasional yang mempengaruhi Filipina untuk membuat kebijakan luar negeri tersebut. Pertama yaitu sengketa perbatasan di kawasan Laut China Selatan yang mana ditandai dengan aktivitas China yang semakin intens dan bersifat provokatif di kawasan Laut China Selatan pasca klaim yang dilakukan oleh mereka dengan mengeluarkan peta sembilan garis putus – putus atau *nine-dash line*. Kedua,

yaitu gelombang terorisme yang mulai mengancam kawasan Asia Pasifik pasca kelompok ISIS terbentuk

### **Untuk Menghadapi China di Sengketa Laut China Selatan**

Sengketa Laut China Selatan merupakan isu lama yang mulai hangat kembali pasca China dengan sepihak mengklaim wilayah tersebut melalui peta resmi mereka nine-dash line. Sejak saat itu, banyak protes dilakukan oleh beberapa negara yang wilayahnya diklaim oleh China. China semakin intens dalam menduduki wilayah Laut China Selatan dengan mengadakan patroli dan membangun pangkalan militer serta landasan pacu untuk pesawat mereka. Hal ini tentunya memicu babak baru dalam konflik perbatasan ini. Dalam perjalanan sengketa Laut China Selatan, pihak China yang terlihat intens dalam hal klaim wilayah perairan tersebut. Hal ini terlihat dari tindakan China yang melakukan reklamasi besar – besaran atas beberapa pulau karang yang menjadi persengketaan di luar kejelasan klaim nine dash line-nya. China membangun artificial island atau pulau buatan untuk membuktikan keseriusannya terhadap klaim kedaulatannya atas wilayah ini. Tindakan yang dilakukan China tentunya semakin memicu kecemasan dari beberapa pihak. Karena kegiatan yang dilakukan oleh China memicu meningkatnya ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Sebuah laporan dari BBC, menggambarkan aktifitas di Laut China Selatan yang berada dibawah kontrol China. Laporan tersebut menjelaskan kegiatan China yang melakukan patroli atau penjagaan di beberapa pulau di kawasan Laut China Selatan. Hal ini dilakukan China untuk memastikan tidak ada kapal asing yang masuk dalam wilayah pulau tersebut. Filipina yang sebagian wilayah lautnya dikawasan Laut China Selatan telah berupaya menentang klaim China tersebut. Salah satunya melalui Pengadilan Internasional di Deen Hag pada tahun 2013. Akan tetapi pihak China menolak hasil tersebut atas dasar klaim historis mereka.

#### *Kekuatan Militer Filipina Lemah Dibandingkan dengan China*

Kekuatan militer Filipina juga tertinggal jauh oleh China yang merupakan pesaing utama dalam perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan kedua negara tersebut mengalami kerenggangan setelah China mengeluarkan peta yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan.

**Tabel 4.1 Perbandingan Kekuatan Militer Filipina dengan China**

Jenis	Jumlah	
	Filipina	China
Pasukan Aktif	430000	2285000
Tank	45	7760
Armoured Fighting Vehicle	778	6000
Helikopter	82	1170
Pesawat Tempur	23	270
Kapal Perang	3	54

Tabel di atas memperlihatkan bahwa militer China mengalahkan militer Filipina di semua sektor. Perbandingan jumlah Tank yang aktif mencapai 200 kali lipat milik militer Filipina, begitupun di sektor udara perbedaannya juga sangat besar. Jumlah personel yang aktif terpaut jauh, hal ini wajar karena jumlah penduduk China lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk Filipina. Hal lain yang menjadikan kekuatan militer Filipina masih

lemah, yaitu jumlah anggaran yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah Filipina untuk belanja keperluan militer, seperti pembelian senjata dan alusista kemudian biaya perawatan peralatan militer yang juga butuh dana tidak sedikit.

Menurut data dari GFP tahun 2015, kekuatan militer Filipina menduduki peringkat 51, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara militer Filipina masih tertinggal baik dalam hal Finansial atau anggaran dan kepemilikan alusista dan alat tempur lainnya. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Presiden Filipina Aquino III bahwa “Kekuatan militer negara kita tergolong lemah dibandingkan dengan negara – negara di Asia” (VOA Indonesia 2016). Pernyataan presiden Aquino III tentunya mengindikasikan bahwa militer Filipina membutuhkan modernisasi supaya dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Oleh karena itu, Pemerintah Filipina melihat kerja sama EDCA yang disepakati dengan Amerika Serikat sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kekuatan militer mereka yang masih lemah dibandingkan dengan China. Perjanjian EDCA tidak hanya memuat kesepakatan penggunaan pangkalan militer bagi pasukan Amerika Serikat, akan tetapi Filipina akan diberikan dukungan Finansial oleh Amerika Serikat sebagai bentuk penguatan aliansi antara kedua negara Filipina. Pada tahun 2015, setelah perjanjian EDCA ditandatangani, Amerika Serikat memberikan bantuan finansial kepada Filipina sebesar US\$ 50 juta dan akan bertambah menjadi US\$120 juta pada tahun 2016, alokasi dana yang diberikan Amerika Serikat kepada Filipina merupakan yang terbesar selama 15 tahun terakhir. Peningkatan alokasi ini dipicu oleh situasi yang memanas dari konflik yang terjadi di kawasan Laut China Selatan yang melibatkan Filipina dan China.

### **Meningkatnya Konflik Domestik di Filipina Selatan**

Disini, kondisi politik dalam negeri merujuk pada situasi konflik domestik yang terjadi di kawasan Filipina Selatan yang ditengarai oleh kelompok islam radikal. Coplin menjelaskan kembali bahwa kondisi politik dalam negeri dipengaruhi atau ditentukan oleh aktor – aktor politik yang mana meliputi birokrasi, partai, kelompok kepentingan dan massa. Kelompok kepentingan disini merujuk kepada kelompok – kelompok islam radikal yang memiliki kepentingan yaitu melepaskan diri dari Filipina. Dalam mencapai kepentingan mereka, kelompok islam radikal ini, menggunakan cara – cara yang ekstrem sehingga mempengaruhi stabilitas atau kondisi politik dalam negeri Filipina.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Filipina dan kelompok islam radikal sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Konflik tersebut terjadi dikarenakan penduduk Filipina Selatan tidak diberikan pemerataan ekonomi dan sumber daya yang adil di kawasan Filipina Selatan. Konflik ini juga disebabkan diskriminasi dan tekanan terhadap identitas budaya di wilayah Filipina Selatan yang mayoritas penduduknya merupakan orang muslim (Muslim Moro). Akibatnya muncul organisasi – organisasi islam radikal yang melawan pemerintahan Filipina selama bertahun – tahun dan sampai sekarang masih berlanjut. Kelompok seperti *Mindanao Independent Movement* (MIM), *Moro National Liberation Front* (MNLF), dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Kemudian muncul kelompok baru yang bernama *Abu Sayyaf Group* (ASG) yang pertama kali muncul pada tahun 1991, yang mana didirikan oleh Abdurajak Abubakar Janjalani tahun 1991. ASG sendiri memiliki tujuan utama yaitu mendirikan negara islam di wilayah Marawi Filipina Selatan. ASG saat ini menjadi organisasi radikal paling berbahaya di Filipina. Mereka telah mengklaim sejumlah serangan seperti pembunuhan berencana, penculikan, pemboman, dan penyerangan tempat publik di kawasan Marawi. Bahkan mereka pernah melakukan penculikan kepada warga negara Amerika Serikat Jeffery Schilling pada 28 Agustus tahun 2000, kemudian bertambah

lagi menjadi 20 orang (Batubara 2016). Kelompok Abu Sayyaf juga membunuh para sandera tersebut dengan cara di penggal kepalanya. Kelompok ini juga dikaitkan dengan jaringan terorisme Al – Qaeda yang mana dituduh sebagai dalang kejadian 9/11.

Kemunculan kelompok ekstrem baru di kawasan Timur Tengah, yaitu *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pada tahun 2013, membuat Kelompok Abu Sayyaf kembali meningkatkan aksi teror mereka. Bahkan mereka telah mengklaim menjadi bagian dari ISIS pada tahun 2014 (BBC, 2016). Tercatat telah dari tahun 2012 sampai dengan 2016, kelompok ini telah melakukan beberapa aksi penculikan terhadap orang – orang asing yang berada di perairan Filipina. Mereka juga melakukan penyerangan pada 28 Agustus 2016 di Patikulu, Sulu. Kejadian tersebut menewaskan sedikitnya 15 tentara Filipina tewas 5 orang lainnya terluka. Kemudian pada bulan September 2016, mereka melakukan pengeboman di sebuah di Davao City. Menewaskan 14 orang dan 7 orang terluka (Tempo, 2019). Teror yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf semakin intens dan membuat Pemerintah Filipina menjadi kewalahan. Filipina dituntut melindungi stabilitas politik dalam negeri mereka. EDCA menjadi penting bagi Pemerintah Aquino III. Hal ini dikarenakan dengan memberikan akses pangkalan militer kepada pasukan Amerika Serikat, otomatis Filipina akan meningkatkan kehadiran Pasukan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Kemudian hal tersebut akan memberikan dampak terhadap terhadap aktivitas terorisme di kawasan Filipina Selatan

#### 4. Kesimpulan

Keputusan Filipina membuka kembali dan memberikan akses ke sejumlah pangkalan militer kepada Pasukan Amerika Serikat menunjukkan bahwa hubungan kedua negara khususnya kerja sama di bidang militer dan keamanan masih tetap kuat. Pasca ditutupnya pangkalan militer milik Amerika Serikat (Subic dan Clark) tidak merusak hubungan kerja sama kedua negara. Pangkalan tersebut dulunya merupakan kekuatan utama Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik dalam menahan pengaruh komunisme pada waktu itu. Kedua negara pasca ditutupnya pangkalan militer, masih menjalin kerja sama militer seperti kerja sama Visiting Forces, Program Balikatan 2002-1. Kemudian Amerika juga masih memberikan bantuan seperti latihan militer bersama.

Beijing pada tahun 2009, secara mengejutkan mengeluarkan peta resmi mereka dan mengajukannya ke PBB. Peta sembilan garis putus – putus atau *nine-dash line* yang dikeluarkan China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan. klaim tersebut tentunya melanggar kedaulatan beberapa negara di kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan ZEE. Negara yang terkena klaim tersebut contohnya Filipina. Wilayah Filipina yang terkena klaim ialah di Kepulauan Sparty dan Scarborough. Beijing tidak hanya mengeluarkan peta (*nine-dash line*), mereka juga melakukan patroli di sekitar Laut China Selatan. Bahkan mereka telah menempatkan beberapa jenis kapal perang dan membangun pangkalan dan landasan pacu untuk pesawat mereka. Filipina telah merespon tindakan yang dilakukan oleh China di kawasan Laut China Selatan. Baik melalui *soft approaching* dan *hard approaching*. Akan tetapi pihak China tidak merespon dan tetap melanjutkan aktivitas mereka di Laut China Selatan.

Oleh karena itu, kebijakan Filipina membuka kembali pangkalan Amerika Serikat dan memberikan akses ke sejumlah pangkalan militer kepada pasukan Amerika Serikat merupakan salah satu respon terhadap situasi - situasi internasional yang berdampak terhadap kondisi politik, ekonomi dan militer Filipina. Melalui Perjanjian EDCA, Filipina membawa kembali militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik secara masif pasca ditutupnya Pangkalan Subic dan Clark. Kehadiran pasukan Amerika Serikat tentunya akan

menguntungkan bagi Filipina dalam menangani sengketa perbatasan dengan China di Laut China Selatan. Penguatan aliansi yang dibangun Filipina dengan Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA akan meningkatkan posisi Filipina di sengketa Laut China Selatan melawan China. Filipina terbukti dibawah China soal kekuatan dan anggaran militer, Filipina juga tidak punya pengaruh kuat seperti China di kawasan Asia Pasifik, sehingga kehadiran Amerika Serikat dibelakang Filipina dapat mendongkrak posisi tawar Filipina dalam sengketa wilayah tersebut. Alasan lain yang membuat Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat adalah konflik domestik yang terjadi di Filipina Selatan oleh kelompok islam radikal seperti Kelompok Abu Sayyaf yang semakin meningkat pergerakannya pasca kelompok ekstrem di timur tengah terbentuk (ISIS). Aliansi Filipina – Amerika Serikat dikawasan Asia Pasifik tidak hanya membendung pengaruh China. Akan tetapi aliansi ini juga fokus terhadap penanganan terorisme yang mulai menyebar di kawasan Asia sejak ISIS dibentuk. Filipina memerlukan bantuan Amerika Serikat dalam peningkatan kapabilitas militer mereka. Dalam perjanjian EDCA Filipina juga diberikan bantuan militer oleh Amerika Serikat, seperti hibah alusista, finansial dan latihan militer selama 10 tahun ke depan. Sehingga dengan adanya perjanjian ini, Filipina dapat fokus menjaga *internal security dan territorial security* secara bersamaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Coplin, William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke -2. Bandung: Sinar Baru

### Jurnal

Castro, Renato Cruz De. 2014. "The 21st Century Philippine-US Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) : The Philippines' Policy in Facilitating the Obama Administration's Strategic Pivot to Asia." *The Korean Journal of Defense Analysis*. Hal 427-446.

Chang, Felix K. 2012. "China Naval Rise and South China Sea : An Operational Assesment." *Foreign Policy*. Hal 19 - 38.

### Internet

BBC Indonesia. 2012. Filipina Menginginkan Militer AS yang Lebih Besar. Januari 27. Diakses pada Maret 27, 2017. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/120127\\_filipina\\_as.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/120127_filipina_as.shtml).

BBC. 2015. "Pukulan bagi Cina dalam sengketa dengan Filipina." [www.bbc.com](http://www.bbc.com). Oktober 30. Accessed November 23, 2018. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151029\\_dunia\\_cina\\_filipina](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151029_dunia_cina_filipina).

Clarke, Tara. 2015. Why Is the South China Sea Important ? Desember 23. <https://moneymorning.com/2015/12/23/why-is-south-china-sea-important/>.

Cobus, Peter. 2017. Kepentingan Filipina di Laut China Selatan. Oktober 21. Diakses pada November 12, 2018. <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/philippines/>.

GOVPH. 2010. Message of His Excellency Benigno S. Aquino III President of the Philippines to the Fifteenth Congress of the Philippines on the BUDget for 2011. Agustus 24. Diakses pada November 23, 2017. <http://www.gov.ph/2010/08/24/2011-budget-message-of-president-aquino/>.

- Jakarta greater. 2014. Militer Amerika Kembali ke Filipina. Diakses pada Oktober 9, 2016. <http://jakartagreater.com/militer-amerika-kembali-ke-filipina/>.
- Kaliwarang, Renne RS. 2009. Pembangunan Pangkalan Militer AS di Filipina. Diakses pada Agustus 20, 2016. <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/40551-pembangunan-pangkalan-militer-as-di-filipina,>.
- PBS. 2003. A Conflicted Land: Rebellion, Wars and Insugancies in the Philippines. Juni 23. <http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/philippines/tl02.html>.
- Philstar. 2016. US - Philippines Agree 5 Base Locations Under EDCA. Maret 20. Diakses pada <http://www.philstar.com/headlines/2016/03/20/1564662/us-philippines-agree-5-baselocations-under-edca>.
- Rosario, Albert Del. 2002. A Progress Report on the Phillipines: The Balikatan Exercises, the Abu Sayyaf and Al Qaeda. Maret 27. Diakses pada 25 April 2018. [:http://www.heritage.org/research/asianandthepasific/HI.748.cfm,](http://www.heritage.org/research/asianandthepasific/HI.748.cfm,).
- Statitics Times. 2014. World GDP Ranking 2014. Diakses pada: Desember 25, 2018. <http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php>.
- Tempo. 2014. AS Filipina tandatangani Kerja sama Pertahanan Baru. April 28. Diakses pada: Oktober 9, 2016. <https://m.tempo.co/read/news/2014/04/28/118573872/as-filipina-tanda-tangani-kerja-sama-pertahanan-baru>.
- VOA Indonesia. 2016. Filipina Modernisasi Armada Angkatan Laut. Juni 2. Diakses pada Maret 29, 2017. <http://www.voaindonesia.com/a/filipina-modernisasi-armada-angkatan-laut/3358321.html>